

Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM

Reh Bungana Beru Perangin-angin¹, Prayetno², Majda El Muhraj³, Fazli Rachman^{4*}

^{1,2,3,4}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Correspondence: fazli.rachman@unimed.ac.id

Abstract

Keywords:

Desa; HAM; tata Kelola Pemerintahan; Covid-19

Gamber Village residents experienced a multidimensional impact due to the Covid-19 Pandemic. The impact felt by the residents is increasingly severe, because the residents of Gamber Village have been relocated due to the eruption of Mount Sinabung. The Village Law mandates the principle of subsidiarity to regulate and manage the interests of local residents. Human rights-based village governance is important to ensure the protection and fulfillment of human rights that are inherent in human dignity in order to emerge from the crisis. PKM is implemented with a people centered development paradigm. The training integrates the concept of education for adults (andragogy). Therefore the training is designed to be participatory. Effective training improves the quality of participants' theoretical and practical understanding of human rights-based Gamber village governance. Increased understanding of participants was obtained from observations made during focused group discussions. Participants discuss a case related to the training topic. The facilitator observes the improvement in the quality of theoretical and practical understanding after the training is carried out. Seeing the urgency and effectiveness of implementing training to improve human rights-based governance, it is necessary to carry out similar activities to respond to crisis management and emerge from the crisis without ignoring the obligation to protect, respect and fulfill human rights.

Pendahuluan

Desa merupakan struktur pemerintahan yang melekat kekuasaan dan kewenangan subsidiaritas mengatur dan mengurus kepentingan warga setempat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)). Pengaturan desa berdasarkan asas subsidiaritas memberikan kewenangan berskala lokal bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan untuk kepentingan warga Desa (UU Desa). Kehadiran UU Desa, memosisikan desa menjadi aktor penting pembangunan nasional penyangga dan pendukung pencapaian pembangunan nasional (El Muhtaj, Prayetno, Perangin-angin, Siregar, & Rachman, 2021; Rachman, Batubara, Kabatiah, & Irwansyah, 2023). Desa merupakan cerminan wajah pembangunan nasional (El Muhtaj et al., 2021).

Pengaturan desa berdasarkan asas subsidiaritas, melekat pada kewajiban kepada Desa dalam merealisasikan kewajiban perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM (El Muhtaj et al., 2021; Rachman, Muhtaj, Siregar, Perangin-angin, & Prayetno, 2022). Karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan standar dan prinsip HAM (Rachman et al., 2022). Sebagai aktor penting pembangunan nasional pada tingkat lokal, desa memiliki tanggung jawab dan kewajiban hak asasi manusia. Melihat ruang lingkup pengaturan dalam UU Desa, Desa memiliki kewenangan melakukan rekayasa positif mewujudkan wajah pembangunan berbasis HAM.

Pandemi Covid-19 membawa implikasi dan tantangan serius pada tata kelola pemerintahan desa mewujudkan pembangunan berbasis HAM (El Muhtaj et al., 2021). Tantangan tata kelola pemerintahan desa diuji pasca penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Kepres No. 12 Tahun 2020. Pandemi Covid-19 membawa realitas baru yang menuntut perubahan mendasar pada agenda pembangunan nasional (El Muhtaj et al., 2021). Penetapan bencana nasional tersebut berimplikasi restrukturisasi item anggaran untuk stabilitas perekonomian dan penanganan pandemi Covid-19 (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020; Permenkeu No. 40/PMK.07/2020). Memperkuat landasan kebijakan penanganan dampak pandemi, berbagai kebijakan darurat diterbitkan pemerintah di tingkat pemerintahan daerah dan desa (baca: Inpres No. 4 tahun 2020; Keppres No. 11 Tahun 2020; Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Perpu No. 1 Tahun 2020; SE Sekjen Kemdikbud No. 15 Tahun 2020). Menyikapi dinamisasi dan perubahan kebijakan pembangunan utamanya dalam penanganan dampak pandemi menempatkan urgensi tata kelola berbasis HAM.

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan lebih berat oleh warga Desa Gamber. Selain Covid-19, warga Desa Gamber telah merasakan erupsi gunung sinabung lebih dari satu dekade (Perangin-angin, Rachman, Prayetno, Siregar, & Muhtaj, 2021; Siregar et al., 2021). Sejak 27 Agustus 2010 awal letusan Sinabung, sekitar 12 ribu orang di sekitar Sinabung dievakuasi, termasuk warga Desa Gamber (Kusumayudha, Lestari, & Paripurno, 2018; Perangin-angin et al., 2021). Selain memaksa warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, erupsi juga menyebabkan warga kehilangan lahan pertanian, fasilitas umum, dan infrastruktur.

Sebagai salah satu desa yang berada di zona merah, Desa Gamber direlokasi. Warga Desa Gamber saat ini bermukim di 2 (dua) lokasi yang berbeda, yaitu di desa Surbakti dan Ndokum Siroga. Bahkan kantor Desa Gamber dipindahkan ke salah satu wilayah relokasi paling banyak warga bermukim. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal ditengah keterbatasan (Kusumayudha et al., 2018; Perangin-angin et al., 2021). Multidimensi dampak yang dirasakan warga desa gambar disebabkan pandemi Covid-19 dan erupsi gunung Sinabung (Kusumayudha et al., 2018; Perangin-angin et al., 2021; Tempo.co, 2020). Untuk memastikan hak-hak dasar warga ditengah keterbatasan, penting untuk kemampuan tata kelola pemerintahan yang memperhatikan standar dan prinsip-prinsip HAM.

Pendekatan HAM dalam tata kelola pemerintahan penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM yang inheren dengan tegaknya kemartabatan manusia (El Muhtaj et al., 2021; Joseph, 2020; Njelesani, Cleaver, Tataryn, & Nixo, 2012; Perangin-angin et al., 2021; Rice, Felizzi, & Hagelgans, 2017). Tata kelola pemerintahan berbasis HAM menjadi kunci untuk merespon pandemi Covid-19. Tata kelola berbasis HAM menyiapkan landasan untuk bangkit dari krisis yang berdampak luas bagi kehidupan warga (khususnya Desa Gamber) (United Nations, 2020). Karena itu, “Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM” sangat penting untuk meningkatkan kualitas desa Gamber untuk menghadapi tantangan dan krisis pandemi Covid-19 dan dampak erupsi gunung Sinabung.

Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dengan paradigma *people centered development*. Paradigma *people centered development* dipilih karena sesuai dengan tujuan PKM yang berupaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dan warga desa secara mandiri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa berbasis HAM (Adimihardja & Hikmat, 2003). Paradigma PKM tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk kegiatan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa berbasis HAM dalam bentuk kegiatan pelatihan. PKM mengangkat tema “Pelatihan Pengarusutamaan HAM dan Pemberdayaan Masyarakat Mewujudkan Desa Peduli HAM”.

Kegiatan PKM dilaksanakan di Desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Peserta pelatihan terdiri dari unsur pemerintahan dan warga Desa Gamber. Menimbang peserta pelatihan adalah individu yang telah dewasa. Maka, pelaksanaan pelatihan memperhatikan konsep Pendidikan untuk orang dewasa (andragogi). Pelatihan didesain partisipatif dengan peserta sebagai pusat pelatihan (*student center learning*) (Malik, 2008; Rachman et al., 2022; Rachman, Prayetno, Muhtaj, Perangin-angin, & Siregar, 2023). Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi peserta pelatihan, kegiatan pelatihan dilengkapi dengan aktivitas *focus group discussion* (FGD) agar pelatihan lebih kontekstual berdasarkan pengalaman dan masalah tata kelola pemerintahan yang dialami oleh peserta dari unsur pemerintahan dan Masyarakat (Irwanto, 2006; Joyce, Weil, & Calhoun, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dikembangkan, didesain dan dilaksanakan didasarkan atas kebutuhan dan masalah yang dialami oleh warga Desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya dijelaskan bahwa sejak 27 Agustus 2010 warga desa Gamber merasakan dampak erupsi gunung sinabung (Kusumayudha et al., 2018; Perangin-angin et al., 2021). Warga Desa Gamber harus mengungsi dan direlokasi di 2 (dua) lokasi yang berbeda. Kantor Desa juga harus dipindahkan ke salah satu wilayah relokasi warga desa Gamber, yaitu Desa Ndukum Siroga, Kecamatan Simpang Empat (Kusumayudha et al., 2018; Perangin-angin et al., 2021). Selain itu, warga harus merasakan kehilangan rumah, lahan pertanian, fasilitas umum, dan infrastruktur.

Pandemi Covid-19 semakin memberatkan warga desa Gamber. Multidimensi dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 dan erupsi gunung Sinabung dirasakan warga desa Gamber (Kusumayudha et al., 2018; Perangin-angin et al., 2021; Tempo.co, 2020). Pandemi Covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Karo (Keputusan Gubernur DKI No. 380 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2020). Kebijakan ini memaksa warga keharusan kerja dari rumah dan membatasi warga beraktivitas diluar rumah. Kebijakan ini berdampak besar pada daya tahan rumah tangga sebagai sumber utama penghidupan keluarga. Lebih-lebih profesi utama warga desa adalah petani (El Muhtaj et al., 2021; Perangin-angin et al., 2021; Rachman & Fitra, 2020; Siregar et al., 2021). Keterbatasan untuk bekerja diluar rumah menurunya pendapatan keluarga, keterbatasan logistik dan pangan untuk masyarakat serta berbagai beban-beban kehidupan mewarnai kondisi masyarakat secara umum (El Muhtaj et al., 2021; Perangin-angin et al., 2021; Rachman & Fitra, 2020; Siregar et al., 2021).

Peran struktur pemerintahan terdekat dengan warga berperan penting pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak dasar warga melalui kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 (baca: Inpres No. 4 tahun 2020; Keppres No. 11 Tahun 2020; Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Perpu No. 1 Tahun 2020; SE Sekjen Kemdikbud No. 15 Tahun 2020). Pendekatan HAM dalam tata kelola pemerintahan desa penting untuk menyiapkan landasan untuk bangkit dari krisis dengan memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM yang inheren dengan tegaknya kemartabatan manusia (UU Desa; El Muhtaj et al., 2021; Joseph, 2020; Njelesani et al., 2012; Perangin-angin et al., 2021; Rice et al., 2017; United Nations, 2020). Dasar pikir tersebut mendorong alasan mengapa PKM ini didesain dalam bentuk “Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM”

Untuk membantu pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tim Pengabdian selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan peserta yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat Desa Gamber. Kegiatan PKM direncanakan dilaksanakan di Balai Desa Gamber sementara di wilayah relokasi di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. PKM direncanakan pada Senin, 1 September 2021.

Paradigma *people centered development* dipilih karena berorientasikan pada pembangunan, pengembangan dan penguatan kelembagaan yang berpusat pada penguatan kapasitas (Adimihardja & Hikmat, 2003; Budhi & Aminah, 2009; Devkota, 2000). Paradigma diharapkan membawa kemandirian warga dan unsur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa berbasis HAM. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas unsur pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa berbasis HAM. Melihat karakteristik peserta yang termasuk orang dewasa, maka PKM didesain dalam bentuk pelatihan yang partisipatif dengan memperhatikan konsep pendidikan untuk orang dewasa (andragogi) (Malik, 2008; Yusri, 2017). Oleh sebab itu, pelatihan memposisikan peserta sebagai pusat aktivitas dalam pelatihan (*center of training*) (Malik, 2008). Materi pelatihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Materi dan Narasumber Pelatihan

No.	Materi	Pemateri
1	Pemerintahan dan Tata Kelola Berbasis HAM dan Pembangunan	Majda El Muhtaj (Kepala Pusham Unimed)
2	Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Partisipatif	Prayetno (Peneliti Pusham Unimed)

3	Pemberdayaan Kerentanan dalam Pembangunan di Masa Pandemi	Reh Bungana Beru Perangin-Angin (Peneliti Pusham Unimed)
4	Strategi Pembangunan dan Perlindungan Kelompok Rentan di Indonesia	Fazli Rachman (Peneliti Pusham Unimed)

Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Berbasis HAM

Sesuai dengan rencana, PKM dilaksanakan pada Senin, 1 September 2021 di Balai Desa Gamber, yang berada di Desa Ndukum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pelaksanaan PKM dihadiri oleh peserta yang telah diklasterisasi yaitu, dari unsur pemerintah dan masyarakat Desa Gamber. Pelaksanaan dimulai pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan “Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM” berjalan efektif dan kondusif serta tidak monoton. Hal ini karena pelatihan telah didesain dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan untuk orang dewasa (peserta) dewasa (Adimihardja & Hikmat, 2003; Malik, 2008; Yusri, 2017). Peserta pelatihan justru didorong secara aktif untuk terlibat dalam pelatihan.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis HAM

Pelaksanaan PKM dapat digambarkan dalam susunan kegiatan pelatihan “Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM” dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Materi dan Narasumber Pelatihan

Materi	Penanggung Jawab	Waktu
Pembukaan	Pembawa Acara	09:00-09:05 WIB
Sambutan dari Kepala Pusham Unimed	Majda El Muhtaj	09:05-09:20 WIB
Sambutan dari Kepala Desa Gamber Sekaligus Membuka Acara	Thomas Sitepu	09:20-09:30 WIB
Pelatihan	Fasilitator	09:30-09:40 WIB
Materi 1: Pemerintahan dan Tata Kelola Berbasis HAM dan Pembangunan	Majda El Muhtaj	09:40-10:40 WIB
Materi 2: Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Partisipatif	Prayetno	10:40-11:40 WIB
Istirahat	Fasilitator	11:40-13:30 WIB
Materi 3: Pemberdayaan Kerentanan dalam Pembangunan di Masa Pandemi	Reh Bungana Beru Perangin-Angin	13:30-14:00 WIB
Materi 4: Strategi Pembangunan dan Perlindungan Kelompok Rentan di Indonesia	Fazli Rachman	14:00-14:30 WIB
Focused Group Discussion	Fasilitator	14:30-15:45 WIB
Penutup	Pembawa Acara	15:45-16:00 WIB



Gambar 2. Penyerahan Cendramata dan Foto Bersama Setelah Kegiatan Pelatihan

Evaluasi dan Refleksi

Tahapan akhir dari program PKM adalah evaluasi dan refleksi. Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta baik dari unsur pemerintah dan warga Desa Gamber dilakukan observasi pada saat *focused group discussion*. Fasilitator melakukan observasi selama *focused group discussion* untuk mengevaluasi peningkatan kualitas pemahaman teoritis dan praktis tata kelola pemerintahan desa gambar berbasis HAM. Peserta difasilitasi untuk mendiskusikan sebuah kasus berkaitan dengan topik pelatihan. Peserta diminta untuk menjelaskan langkah-langkah hingga menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan desa gambar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terlihat adanya peningkatan pemahaman teoritis dan praktis tata kelola pemerintahan pada peserta latihan.

Kesimpulan

Tata kelola pemerintahan berbasis HAM memastikan tegaknya kemartabatan manusia landasan untuk bangkit dari krisis. Tata kelola pemerintahan berbasis HAM memastikan upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM dalam upaya penanganan Covid-19. Pelatihan Tata Kelola Desa Gamber Berbasis HAM Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Mewujudkan Desa Peduli HAM memberikan peningkatan kepada unsur pemerintah dan masyarakat desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Paradigma *people centered development* mendorong peserta membangun kemandirian untuk melakukan Tata kelola pemerintahan untuk penanganan penyebaran dan dampak pandemi Covid-19. Desain pelatihan dengan pendekatan partisipatif dengan memposisikan peserta sebagai pusat aktivitas dalam pelatihan (*center of training*) sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman peningkatan pemahaman teoritik dan praktik tata kelola pemerintahan berbasis HAM.

References

- Adimihardja, K., & Hikmat, H. (2003). *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Bandung: Humaira.
- Budhi, G. S., & Aminah, M. (2009). Faktor-Faktor Dominan dalam Pembentukan Lembaga Sosial. *Forum penelitian Agro Ekonomi*, 27(1), 29–41. Diambil dari <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1091>
- Devkota, P. L. (2000). *People-centered Development in Nepal: An Innovative Approach*. 26–40. <https://doi.org/10.3126/OPSA.V6I0.1100>
- Djiwandono, S. E. W. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- El Muhtaj, M., Prayetno, Perangin-angin, R. B. B., Siregar, M. F., & Rachman, F. (2021). The Covid-19 Pandemic and Human Rights-Based Approach to Local Governance in Desa Pakam, Batu Bara, North Sumatra. *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 642, 430–436. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.066>
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Irwanto. (2006). *Focused Group Discussion*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Joseph, S. (2020). International Human Rights Law and the Response to the covid-19 Pandemic. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 11(2), 249–269. <https://doi.org/10.1163/18781527-bja10004>
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). *Models of Teaching: Model-model Pembelajaran* (Delapan).

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Kusumayudha, S. B., Lestari, P., & Paripurno, E. T. (2018). Eruption Characteristic of the Sleeping Volcano, Sinabung, North Sumatera, Indonesia, and SMS Gateway for Disaster Early Warning System. *Indonesian Journal of Geography*, 50(1), 70–77. <https://doi.org/10.22146/ijg.17574>
- Kyriacou, C. (2009). *Effective Teaching in Schools: Theory and Practice* (Third). Delta Place: Nelson Thornes.
- Malik, H. K. (2008). Teori Belajar Andragogi dan Aplikasinya dalam Pembelajaran. *Jurnal Inovasi*, 5(2), 1–16.
- Njelesani, J., Cleaver, S., Tataryn, M., & Nixo, S. (2012). Using a Human Rights-Based Approach to Disability in Disaster Management Initiatives. In S. Cheval (Ed.), *Natural Disasters* (hal. 21–46). <https://doi.org/10.5772/32319>
- Perangin-angin, R. B. B., Rachman, F., Prayetno, Siregar, M. F., & Muhtaj, M. El. (2021). Responses of Communities Affected by the Sinabung Eruption to COVID-19: A Human Rights-Based Review. In B. Sinaga, H. Fibriasari, & J. Rajagukguk (Ed.), *Proceedings of the 3rd International Conference on Innovation in Education, Science and Culture, ICIESC 2021, 31 August 2021, Medan, North Sumatera Province, Indonesia* (hal. 434–439). <https://doi.org/10.4108/EAI.31-8-2021.2313813>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseasi (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Rachman, F., Batubara, A., Kabatiah, M., & Irwansyah. (2023). Pendampingan Mewujudkan SDGs Desa Point Partnership For The Goals Melalui Sistem Informasi Desa Berbasis Web Sebagai Respresentasi Desa Wisata Berkelanjutan. In T. Hutagalung, H. P. Tambunan, E. E. Simanjuntak, & F. M. Nasution (Ed.), *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 14 September 2022* (hal. 418–425). Medan: CV. Kencana Emas Sejahtera.
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020). Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 289–303. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p289-303>
- Rachman, F., Muhtaj, M. El, Siregar, M. F., Perangin-angin, R. B. B., & Prayetno, P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Desa Pakam Peduli Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 6(3), 241–250. <https://doi.org/10.35334/JPMB.V6I3.2487>
- Rachman, F., Prayetno, P., Muhtaj, M. El, Perangin-angin, R. B. B., & Siregar, M. F. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.24036/ABDI.V5I1.316>
- Rice, K., Felizzi, M. V., & Hagelgans, D. (2017). Human Rights-Based Approach to Disaster Management: Valparaiso, Chile. *J. Hum. Rights Soc. Work*, 2, 117–127. <https://doi.org/10.1007/s41134-017-0040-5>
- Setyosari, P. (2017). Menciptakan Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pembelajaran*, 1(5), 20–30. <https://doi.org/10.17977/um031v1i12014p020>
- Siregar, M. F., Wahyudi, A., Hadiningrum, S., Rachman, F., Perangin-angin, R. B. B., Prayetno, P., ... Melianti, Y. (2021). Community Awareness Not to Acivete in the Red Zone of Mt. Sinabung Eruption. *Jurnal Ilmiah Teunuleh*, 2(4), 59–66. <https://doi.org/10.51612/TEUNULEH.V2I4.75>
- Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). (n.d.).

Tempo.co. (2020). Mount Sinabung Erupts for First Time During COVID-19 Pandemic. Diambil 5 Agustus 2021, dari en.tempo.co website: <https://en.tempo.co/read/1373966/mount-sinabung-erupts-for-first-time-during-covid-19-pandemic>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).

United Nations. (2020). *COVID-19 and Human Rights: We are all in this together.* Diambil dari https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf

Yusri, Y. (2017). Strategi Pembelajaran Andragogi. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.24014/af.v12i1.3861>

Yusuf, B. B. (2018). Konsep dan Indikator Pembelajaran Efektif. *Jurnal Kajian Pembelajaran dan Keilmuan*, 1(2), 13–20.